

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI
ADMINISTRASI KASUS LUMPUR LAPINDO DALAM SISTEM HUKUM
INDONESIA**

Tri Dara Pamungkas

1187024

ABSTRAK

Penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Sanksi Administrasi Kasus Lumpur Lapindo Dalam Sistem Hukum Indonesia” mengangkat kasus luapan lumpur yang terjadi di Sidoarjo 10 tahun silam, dimana PT. Lapindo Brantas digugat telah melakukan PMH dan diwajibkan untuk mengganti kerugian para korban. Pembayaran ganti rugi dilakukan dengan dana talangan dari pemerintah melalui APBD. Selain sanksi perdata sanksi lainnya yaitu sanksi administrasi dapat diterapkan dalam kasus ini, maka penulis merumuskan 2 (dua) masalah pokok, yakni: (1) Apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas Inc. merupakan perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi administrasi; (2) Apakah pencabutan izin dapat menggugurkan kewajiban PT. Lapindo Brantas Inc. kepada para korban terdampak.

Penelitian dalam kaitannya dengan penulisan ini termasuk jenis penelitian hukum *normative*, yaitu berarti penelitian mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Dalam penulisan ini pula dipergunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan: (1) Perbuatan PT. Lapindo Brantas Inc. telah memenuhi unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menimbulkan kerugian materil dan imateril sesuai dengan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup izin PT. Lapindo Brantas dapat dicabut; (2) Kewajiban PT. Lapindo Brantas Inc. terhadap para korban harus tetap dilaksanakan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tanggung jawab mutlak Pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Kata kunci: Sanksi Administrasi, Pencabutan Izin, Lumpur Panas Lapindo

**LEGAL ANALYSIS OF THE ADMINISTRATIVE SANCTION ON THE
LAPINDO MUD CASE IN INDONESIA LEGAL SYSTEM**

Tri Dara Pamungkas

1187024

ABSTRACT

The construction of this thesis titled “Legal Analysis Of The Administrative Sanction On The Lapindo Mud Case In Indonesia Legal System” raise the flow of mud that happen in Sidoarjo 10 years ago, whereas PT. Lapindo Brantas were sued for tort and incumbent to compensate to all the victims. The compensation is had with bail out from the Government through Regional Budget. Other Than civil sanction, administrative sanction could be applied in this case , therefore the writer concluded 2 (two) main issues: (1) whether tort done by PT. Lapindo Brantas Inc. could be considered as an act that deserved administrative sanction; (2) Whether the license repeal could terminate the obligation of PT. Lapindo Brantas Inc. to the victims who were effected by the event.

The research related to this thesis is based on legal normative research, which mean the research referred to existing literature or other secondary information. In this thesis, the statue approach also applied where the approach was based on all acts and regulations that has correlation with the legal issue.

The result on this thesis shows: (1) the action of PT. Lapindo Brantas Inc. has completed the elements of tort that stated on Article 1365 civil code, which caused material and immaterial loss according to Article 27 Act Number 23 year 1997 on Environmet Management, the license of PT. Lapindo Brantas Inc. could repeal; (2) The obligation of PT. Lapindo Brantas Inc. to the victims shall be carried based on Article 149 paragraph (1) letter c Act Number 40 year 2007 on Limited Liability Companies and absolute responsibility of Article 35 Act Number 23 year 1997 concerning Environment Management.

Keywords: Administrative Sanction, License Repeal, Lapindo Hot Mud

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pernyataan Keaslian	i
Lembar Pengesahan Pembimbing	ii
Lembar Persetujuan Panitia Sidang ujian	iii
Lembar Persetujuan Revisi	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	20
 BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara	23
1. Pengertian Hukum Administrasi Negara	23
2. Perkembangan Hukum Administrasi Negara	25
3. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara	28
B. Fungsi Hukum Administrasi Negara	30
C. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik	36
D. Perbuatan yang Di Atur Dalam Hukum Adminstrasi Negara	40

E. Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara	42
---	----

BAB III TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PT. LAPINDO BRANTAS

A. Kronologis Kasus Luapan Lumpur Lapindo	48
B. Pelanggaran Hukum Administrasi Dalam Sistem Hukum di Indonesia	52
C. Macam-macam Sanksi Administrasi dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi	59
D. Izin Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara	64
1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (<i>Beschiking</i>)	64
2. Macam-macam Ketetapan	68
E. Aspek-aspek Hukum Pencabutan Izin dan Konsekuensi Yuridisnya	71
1. Pengertian Izin	71
2. Aspek Yuridis Izin dan Pencabutan Izin Sebagai Sanksi ...	72

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM KASUS LUMPUR LAPINDO DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADMINISTRASI

A. Analisis Perbuatan Melawan Hukum PT. Lapindo Brantas Dikaitkan Dengan Penjatuhan Sanksi	78
1. Kronologis Peristiwa	78
2. Kerugian yang Timbul Akibat Dari Luapan Lumpur Panas	80
3. Langkah Penyelesaian Yang Telah Ditempuh	81
4. Kasus Luapan Lumpur Lapindo Dikaitkan Dengan Hukum Administrasi	95
B. Analisis Pencabutan Izin Dikaitkan Dengan Kewajiban PT. Lapindo Brantas Terhadap Korban Terdampak	102
1. Izin Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara	102

2. Proses Pencabutan Izin	108
3. Kewajiban PT. Lapindo Brantas Terhadap Para Korban Terdampak	112

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	116
B. Saran	117

Daftar Pustaka

Curriculum Vitae

Matrix

